



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

| | |
|----------------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2021-2022 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI, Menteri Keuangan RI, dan Panglima TNI beserta KASAL |
| Hari, Tanggal Pukul | : Kamis, 24 Maret 2022 : 13.16 WIB – 14.20 WIB |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1. |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI |
| Acara | : Membahas Surat Presiden Nomor: R-57/Pres/12/2021, tanggal 15 Desember 2021, Hal: Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan. |
| Hadir | : PIMPINAN: 1. Meutya Viada Hafid (F-PG) 2. Drs. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) 3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra) 4. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. (F-PD) 5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) |

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
9. Junico BP Siahaan, S.E.
10. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
11. Ir. Rudianto Tjen
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Drs. Mukhlis Basri
15. Itet Tridjajati Sumarijanto

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
18. I. Lodewijk F. Paulus
19. Nurul Arifin, M.Si.
20. Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
21. H. Alex Noerdin

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

22. Sugiono
23. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
24. Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc.
25. Rachel Maryam Sayidina
26. Fadhlullah, S.E.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

27. Prananda Surya Paloh
28. Muhammad Farhan
29. Kresna Dewanata Phrosakh
30. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
31. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

32. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
33. Dr. (H.C.) H. A Muhaimin Iskandar, M.Si.
34. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
35. A. Helmy Faishal Zaini
36. H. Bachrudin Nasori, M.Si., M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

37. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
38. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
39. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
40. Teuku Riefky Harsya

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

41. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
42. H. Sukamta, Ph. D.
43. H. Ahmad Syaikhu
44. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

45. Ir. Alimin Abdullah
46. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
47. Hj. Farah Puteri Nahlia, M.Sc.
48. Slamet Ariyadi, S.Psi.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

49. H. M. Arwani Thomafi
50. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

Anggota yang Izin : 1. Mayjen TNI Mar. (Purn)
Sturman Panjaitan, S.H. (F-PDIP)
2. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. (F-PG)
3. R. Imron Amin, S.H., M.H. (F-Gerindra)

Undangan : 1. Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI
Muhammad Herindra, M.A., M.Sc.
2. Panglima TNI, Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa,
S.E., M.A., M.Sc., M.Phil, Ph.D.
3. Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suahasil Nazara, S.E.,
M.Sc., Ph.D.
4. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo
Margono, S.E., M.M.
Beserta Jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Saya ucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra M.A., M.Sc. beserta seluruh jajarannya.

Saudara Wakil Menteri Keuangan Profesor Suhasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D beserta seluruh jajarannya.

Saudara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa S.E., MA., M.Si.

Dan saudara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono S.E., M.M.

Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Pada hari ini Kamis 24 Maret 2022. Bapak, Ibu sekalian berdasarkan informasi dari sekretariat rapat hari ini sudah diikuti oleh 7 fraksi, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Yang belum hadir Nasdem dan PKB tapi akan menyusul. Dengan demikian kuorum fraksi telah terpenuhi dan dengan demikian mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.16 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)**

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN (LETNAN JENDERAL TNI (PURN.) IDA BAGUS PURWALAKSANA, S.I.P., M.M.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oh ya?

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN (LETNAN JENDERAL TNI (PURN.) IDA BAGUS PURWALAKSANA, S.I.P., M.M.):

Tapi mohon kalau bisa untuk rapat ini untuk tertutup saja Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Tertutup atau terbuka? Tertutup, agendanya cuma satu Pak cuma satu.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Pimpinan agenda utama kan memang penjualan kapal akan tetapi bila ada pendalaman hal lain tentang isu-isu strategis mungkin bisa dilakukan secara tertutup bila mana nanti kalau berkembang.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Saya kira karena agenda dalam dalam undangan agendanya cuma satu juga.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Ya jadi bila mana ada perkembangan baru bisa di itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Komisi I DPR RI telah mendapat penugasan dari rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 3 Februari 2022 untuk membahas Surat Presiden Nomor R-57/Pres/12/2021 tertanggal 15 Desember 2021 terkait dengan persetujuan penjualan barang milik negara berupa eks kapal KRI Teluk Sampit 515 pada Kementerian Pertahanan. Menindaklanjuti hal tersebut rapat intern Komisi I DPR RI pada tanggal 15 Maret 2022 memutuskan untuk segera membahas persetujuan terhadap penjualan barang milik negara berupa eks KRI Teluk Sampit 515 pada Kementerian Pertahanan.

Untuk itu pada hari ini kita akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan yang diwakili oleh Wamenhan Menteri Keuangan yang diwakili oleh Wamenkeu, Panglima TNI beserta Kasal untuk mendapatkan penjelasan terkait penjualan barang milik negara berupa eks KRI Teluk Sampit 515 pada Kementerian Pertahanan.

Selanjutnya keputusan rapat kita pada hari ini akan kita laporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana amanat Pasal 233 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Tertib. Untuk itu kami sampaikan kami persilahkan kepada yang terhormat Wakil Menteri Keuangan. Kemudian nanti Wakil Menteri Pertahanan untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda pada hari ini Wakil Menteri Pertahan. Kepada Wamenkeu kami persilakan.

WAKIL MENTERI KEUANGAN (PROF. SUAHASIL NAZARA, S.E., M.SC., PH.D.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak-bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Ibu, Bapak Anggota Komisi I DPR RI.

Yang kami hormati Bapak Wamenhan Bapak Panglima dan seluruh teman-teman yang hadir dari Kementerian Pertahanan dan Pemerintah.

Izin Bapak Pimpinan kami pertama ingin menyampaikan salam dari Ibu Menteri yang sedianya terundang namun tidak bisa hadir langsung karena beliau sekarang ada di Riau. Jadi beliau menugaskan kami untuk mewakili Menteri Keuangan dan menyampaikan mengenai di agenda pelepasan barang milik negara.

Kami bisa sampaikan bahwa yang sampai kepada DPR adalah surat dari Bapak Presiden Nomor 257 R57 Press, 12, 2021 dan kami ingin menyampaikan bahwa usulan penjualan ini atau usulan pelepasan ini sesungguhnya telah dimulai sejak tanggal 23 Maret 2020 ada usulan penjualan eks KRI Teluk Sampit yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan. Ini sesuai dengan prosedur yang ada diajukan oleh kementerian. Lalu kemudian ada permohonan niat untuk melakukan *refurbishment* dan karena itu ada penghentian ketika itu oleh Kementerian Pertahanan. Namun kemudian di setelah dilakukan perhitungan-perhitungan kemudian dilanjutkan lagi sehingga karena telah dilakukan perhitungan dengan seksama

bahwa akan lebih baik dilepaskan, dibandingkan, dilakukan *refurbishment* karena kondisi dari eks KRI ini yang cukup parah.

Karena itu pada tanggal 28 April 2021 dilakukan pengusulan kembali sesuai ketentuan dan kami di Kementerian Keuangan kemudian memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya menyatakan bahwa pemindahtanganan atau penjualan barang milik negara yang nilainya nilai perolehannya di atas Rp100.000.000.000,- harus dilakukan persetujuan izin Dewan Perwakilan Rakyat.

KRI Teluk Sampit nilai perolehannya adalah Rp173.966.007.672,- diperoleh pada tahun 1978 tipenya *landing ship tank* lokasinya di dermaga Koarmada 2 Surabaya. Kami dalam *assessment* yang kami lakukan di Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pertahanan dan juga TNI AL menyatakan bahwa kondisi material kapal rusak berat beserta sistem-sistemnya permesinan kelistrikan navigasi dan yang lainnya dan instrumen anjungan kapal tidak dapat digunakan lagi.

Kami mohon izin nanti mungkin teman-teman dari Kementerian Pertahanan dan TNI AL bisa mengelab (suara tidak ada 09.38-12.34).

WAKIL MENTERI PERTAHANAN (LETNAN JENDERAL TNI MUHAMMAD HERINDRA, M.A., M.SC.):

Surat keputusan kepada Staf TNI Angkatan Laut tentang penghapusan 15 unit KRI pada renstra 2 MEF 2015-2019. Sesuai Permenhan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN Selain Tanah dan atau Bangunan di Lingkungan Kemhan dan TNI dan Permenhan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemindahtanganan BMN Selain Tanah dan atau Bangunan di Lingkungan Kemhan TNI tim penelitian dan pencelaan untuk penghapusan TNI Angkatan Laut merekomendasikan hal sebagai berikut.

Yang pertama, secara teknis bahwa kondisi material tidak layak digunakan akibat bangunan kapal dan perpipaan banyak yang keropos. Kedua, permesinan, kelistrikan, peralatan navigasi komunikasi dan instrumen di anjungan sudah tidak bisa digunakan lagi. Ketiga, kondisi plafon dan sewaco tidak layak dipergunakan serta keempat tidak efisien untuk diperbaiki atau *refurbishment*.

Dengan melihat kondisi tersebut maka didapatkan daya taksiran atau limit jual atau lelang KRI Teluk Sampit 515 buatan tahun 1980 sebesar Rp740.306.974.000,- Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Kasal kepada Panglima TNI terkait permohonan penghapusan dengan cara pemindahtanganan atau dilelang. Kemudian Panglima TNI mengajukan surat kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang permohonan penghapusan dengan cara dipindahtangankan atau dilelang.

Menindak lanjuti surat Panglima TNI tersebut Kementerian Pertahanan telah melakukan *assessment* dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Setelah data hasil *assessment* lengkap dan sesuai dengan persyaratan Kementerian Pertahanan membuat surat kepada Kementerian Keuangan tentang permohonan persetujuan pemindahtanganan lelang KRI Teluk Sampit 515 yang merupakan inventaris TNI Angkatan Laut dengan Koarmada 2. Dengan menggaris bawahi bahwa penghapusan KRI teluk Sampit 515 tidak akan mengganggu tugas pokok dan fungsi TNI Angkatan Laut dan menyertakan dokumen data dukung penghapusan KRI tersebut.

Sesuai dengan Permenhan Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 diatur bahwa pemindahtanganan BMN selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.000,- adalah kewenangan Kementerian Keuangan nilai perolehan lebih dari Rp10.000.000.000,- sampai Rp100.000.000.000,-

dilaksanakan atas persetujuan Presiden RI dan nilai perolehan lebih dari Rp100.000.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Atas dasar peraturan tersebut maka Kementerian Pertahanan RI membuat surat kepada Kementerian Keuangan RI sebagai pengelola barang milik negara. Selanjutnya Kemenkeu meneruskan surat tersebut kepada Presiden Republik Indonesia. Finalisasi proses penghapusan dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia dan membuat surat kepada DPR RI tentang permohonan persetujuan pemindahtanganan dan penjualan secara lelang BMN berupa KRI Teluk Sampit 515.

Hadirin yang kami hormati.

Sebelum mengakhiri paparan tentang persetujuan penjualan barang milik negara berupa KRI Teluk Sampit 515 izinkan saya untuk memberikan gambaran kondisi terkini dari KRI Teluk Sampit 515 melalui tayangan *slide* sebagai berikut:

1. Pertama, gambar menampilkan bangunan kapal plafon anjungan dan geladak dengan kondisi rusak berat dan tidak layak pakai.
2. Kedua gambar menampilkan ruang mesin dengan kondisi rusak berat. Semua dah keropos ini Pak.

Kesimpulan dari paparan yang telah kami sampaikan tentang proses penghapusan KRI Teluk Sampit 515 adalah:

1. Secara administrasi proses penghapusan barang milik negara berupa KRI Teluk Sampit 515 sudah sesuai dengan Permenhan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN Selain Tanah dan atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dan Permenhan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Selain Tanah dan Atau Bangunan di Lingkungan Kemhan TNI.
2. Penghapusan KRI Teluk Sampit tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi TNI Angkatan Laut.
3. Pemindahtanganan dengan penjualan KRI Teluk Sampit 515 dapat menjadi masukan bagi negara.

Demikian penjelasan secara umum yang dapat kami sampaikan semoga niat baik kita ini mendapatkan ridho dari Tuhan yang maha kuasa dan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih kepada Saudara Wamenhan untuk selanjutnya kepada saudara Panglima TNI untuk menyampaikan. Kan alurnya memang dari Kasal, Panglima, Kementerian Menteri Pertahanan, dan Keuangan kemudian Presiden jadi kita balik untuk mengambil persetujuan. Silakan Pak Panglima.

PANGLIMA TNI (JENDERAL TNI MUHAMMAD ANDIKA PERKASA, S.E., M.A., M.SC., M.PHIL, PH.D.):

Paparan yang kami siapkan sama Pak. Kemudian kalau memang nanti dalam tanya jawab ada pendalaman pun Kasal juga siap menambahi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Intinya sudah melalui Panglima ya? Baik. Selanjutnya Kepala Staf Angkatan Laut kami persilakan.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT (LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak, saya kira juga sama untuk paparannya karena dari bawah Pak. Mungkin nanti ada pendalaman nanti kami siap untuk menjawab.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, karena dalam paparan ini juga sudah terangkum apa yang disampaikan oleh Wamenhan, untuk itu saya tawarkan apakah kita langsung mengambil pendapat saja tentang ini biar nggak terlalu panjang?

PESERTA RAPAT:

Setuju. Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kita ambil pendapat per fraksi ya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pimpinan. Sebelum fraksi, izin Pak sebelum pendapat pandangan fraksi. Saya ingin menyamakan dulu tahun pembuatannya itu dari Wamen tahun '80, punya Bapak Kasal '81. Kemudian perolehan tahun 78 yang mana yang pas ini? Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Bisa dijawab ini ada tahun pesan ada tahun pembuatan ada tahun kemudian dipakai jadi mungkin.

PESERTA RAPAT:

Mungkin Angkatan Laut yang bisa.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan Pak Kasal.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Ambil tengah-tengahnya saja tahun '79.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT (LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M.):

Saya mohon izin menjawab Bapak. Jadi untuk tahun pembuatan ini tahun 1981, masuk jajaran TNI AL tanggal 8 Agustus 1982.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Berarti yang '78 apa tadi? Pesanan ya?

WAKIL MENTERI PERTAHANAN (LETNAN JENDERAL TNI MUHAMMAD HERINDRA, M.A., M.SC.):

Kontrak Pak '80.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kontrak ya oh begitu memang bangunkan nggak bisa langsung jadi ya jelas Pak?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Yang tahun '80 tadi dari Wamen tadi apanya itu?

WAKIL MENTERI PERTAHANAN (LETNAN JENDERAL TNI MUHAMMAD HERINDRA, M.A., M.SC.):

Kontraknya itu Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oh kontraknya '80 perolehan '78.

WAKIL MENTERI PERTAHANAN (LETNAN JENDERAL TNI MUHAMMAD HERINDRA, M.A., M.SC.):

Begini Pak mungkin dari apa itu namanya dari RKA nya '78. Kemudian setelah itu baru diterima dari kita kemudian Angkatan Laut begitu Pak alurnya. Terima kasih Pimpinan.

F-PD (DR. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik saya minta pendapatnya langsung per fraksi kita minta dari Fraksi PDIP dulu silakan.

F-PD (DR. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Pak Ketua, satu dulu terima kasih Pak ketua.

Yang saya hormati Pak Wamen Panglima dan Kasal.

Melengkapi apa yang disampaikan secara kualitatif memang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang KRI Sampit ini sudah tidak efisien. Namun, tadi disampaikan bahwa KRI ini sudah rusak berat. Nah kalau dikatakan rusak berat ini agak subjektif. Rusak berat di sisi a tetapi belum tentu sisi b itu terminologinya sama.

Nah pertanyaan saya ini hanya untuk memperkuat. Memperkuat argumentasi kita bahwa memang layak untuk dijual. Tadi disampaikan bahwa kalau dilakukan *overhaul*, perbaikan pun juga tidak ekonomis. Pertanyaannya ini hanya untuk melengkapi, melengkapi data, untuk memperkuat argumentasi kita persetujuan kita. Apakah pernah dilakukan analisa/kalkulasi seandainya dilakukan perbaikan? Nah dari situ secara kuantitatif kita menarik kesimpulan bahwa memang sudah tidak layak untuk dipertahankan. Pertanyaannya itu saja. Jadi kalau memang itu ada datanya berapa, kira-kira biayanya berapa? Ini perlu sebagai landasan pemikiran secara kuantitatif terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Wamenhan atau Pak Kasal langsung?

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Izin Pimpinan untuk melanjutkan yang tadi Prof Sjarif tadi sampaikan. Mungkin ada sedikit yang bisa dipaparkan. Tadi kan Pak Wamenkeu mengatakan dengan dijualnya itu berpotensi menambahkan keuangan buat negara. Nah kalau misalnya Pak ya itu kapal di tenggelamkan dijadikan taman wisata di dalam laut itu kan juga berpotensi wisata dan juga berpotensi untuk menambahkan keuangan buat negara. Nah apakah pernah ada perhitungan seperti hal tersebut terhadap dampak ekonomi lokal ataupun juga secara nasional?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Kasal silakan Pak Kasal.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT (LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M.):

Terima kasih

**Yang terhormat Pimpinan
Para Bapak, Ibu Anggota DPR
Yang terhormat Panglima TNI dan Wamen serta Kemenkeu.**

Menjawab dari Pak Sjarief Hassan bahwa untuk menentukan kapal ini *disbush* atau tidak ini sudah melalui *survey* yang lama Pak. Jadi kapal ini sebenarnya sudah sejak tahun 2015-'16 itu sudah tidak beroperasi karena sudah dinyatakan dari hasil *survey*-nya ini tidak memungkinkan untuk di perbaiki kembali. Ya, tentunya dari ketebalan baja ini juga ada penghitungannya Pak jadi ada pengukurannya bahwa ini sudah menipis dan sudah, sudah

sering dilaksanakan *replating* kalau sudah tidak mampu lagi di replating ya otomatis dari badan kapalnya sudah tidak memenuhi syarat.

Kemudian dari permesinannya juga demikian dan dari semua instrumennya tentunya melalui kajian yang tidak sedikit Pak sebenarnya tebal sekali itu untuk menentukan kapal ini layak di-*disbush* atau tidak, sehingga dengan keputusan dari TNI AL bahwa kapal itu sudah diturunkan ular-ular perangnya. Jadi kapal ini ada ular-ular perang Pak. Kalau itu sudah diturunkan berarti sudah nggak layak sehingga terus diajukan ke secara bertahap ke Panglima TNI ke Kemhan sampai ke sampai ke DPR ini Pak.

Kalau ini dijual diperbaiki harganya mungkin sudah diperhitungkan apabila baru ini yang kelas Youtefa yang tahun 2016 ini harganya 219 Pak kapal baru yang panjangnya lebih besar dari pada ini. Lebih panjang dari ini itu kurang lebih 110 panjangnya itu harganya 219 dengan kapal yang sama.

Nah kalau ini diperbaiki dengan merombak lagi dengan *replating* kemudian dengan ganti mesin dan sebagainya ini mungkin malah lebih dari itu Pak harganya. Sehingga waktu itu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini sehingga diputuskanlah kontrak 9 kapal LST baru sebagai pengganti kapal-kapal ini Pak. Yang terakhir yang sekarang ada RRU satu yang belum selesai Pak dari rangkaian pengganti 9 tadi.

Kemudian menjawab Pak Dave tadi ada pemerintah daerah yang meminta seperti di Bali, kemudian kemarin di Sumatera Barat kemudian ada lagi di sudah dikoordinasikan dengan Menko Marves maupun Menhan. Tapi kenyataannya setelah kita tunggu bertahun-tahun ini juga nggak ada realisasinya Pak. Karena untuk menarik kapal ini menuju ke tempat itu juga butuh biaya khawatirnya lagi juga nanti karena sudah lama tadi begitu ditarik tenggelam di jalan. Ini tentunya pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran yang besar untuk menenggelamkan itu Pak.

Namun kalau itu di mungkin langsung ditangani pusat ya mungkin bisa Pak karena ini kapal sudah lama juga nongkrongnya ini Pak sehingga kalau mau ditarik ditenggelamkan tadi butuh dicek lagi bagian bawah airnya tadi Pak. Sehingga untuk meyakinkan bahwa nanti saat ditarik nggak akan tenggelam. Demikian Pak terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik jelas ya Pak Effendi.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Baik terima kasih, Pak Ketua.

Temen-temen Anggota yang saya hormati.

Bapak Panglima yang saya hormati sudah pulih kembali ya rekor juga 17 hari ya.

Kasal yang saya hormati.

Pak Wamen, Wamenkeu.

Saya ingin tanya begini Pak Wamen dan juga Pak Menteri ya dan Pak Menteri atau Ibu Menteri Keuangan dan Panglima. Ini belum lama bulan lalu juga minta persetujuan seperti ini juga. Nah kenapa nggak sekaligus saja Pak? yang di atas Rp100.000.000.000,- itu kan ketentuannya *value* nya harus persetujuan DPR ya jadi ini juga judulnya ini penjualan lho Pak berarti masih ada nilainya. Nah pertanyaan nilai ini kembali ke Angkatan Laut, apa kembali kemana Pak atau kemana ini? Karena begini Pak kita lihat aset-aset yang disita KPK saja Pak sekarang itu tidak bertuan juga Pak. Ratusan triliun itu Pak nggak ada yang ngurusin itu Pak.

Disita ditaruh saja semua itu dari mulai Transjakarta sampai ke semuanya. Ini kita ini asik saja menyita tapi barang itu hancur begitu saja Pak.

Nah apakah ini pertanyaan saya apakah begitu kami memberi persetujuan di Paripurna nanti langsung ini ada pembelinya senilai 173 tadi? Kalau nggak inikan di buku saja ini Pak, katanya saja ini dialihkan terus untuk apa juga dialihkan? Saya nggak ngerti ini prosedur apa sih sebenarnya. Yang saya maknai bahwa ketentuan-ketentuan di atas Rp100.000.000.000,- itu harga asetnya berpindah kembali kepada negara tetapi di sini harus ada pengisian baru Pak. Nah ini diperhitungkan nggak di renstra kita Pak Panglima atau Pak Menteri atau Pak Wamen? Sebab kalau tidak, lah lantas untuk apa diminta persetujuan ini ini kan harus di isi kekosongan di sini?

Saya nggak tahu di Kasal sendiri seperti apa. Renstra di TNI Angkatan Laut sendiri Pak. Karena belum lama kalau tidak salah satu setengah bulan lalu ya Pak kita baru nanti minggu depan ada lagi, minggu depan ada lagi, 15 unit ya yang masih diajukan Pak ya? 15 Kasal ya? Iya kan Pak? 15. Apa sih yang menjadi penyebab kenapa per minggu per minggu begitu? Ada apa Pak masalahnya dimana? Kenapa nggak sekaligus saja gelar ke kami paparkan kapalnya mana fisiknya mana kalau perlu kami ninjau juga fisiknya Pak jangan katanya-katanya saja Pak. Kita nggak tahu barangnya dimana ini jangan-jangan sudah nggak ada lagi cuma gambar-gambarnya saja yang dikasih lihat ini. Kita tidak tahu ini masih ngapung apa nggak ini?

Rp173.000.000.000,- itu besar lho Pak tadi kalau paparan dari Pak Kasal yang baru saja sejenis LST 219 itu lokal Pak ya? Maka perbedaannya kurang lebih Rp40.000.000.000,-. Nah berarti ini masih punya nilai Pak Wakil Menteri Keuangan. Nah Anda sebagai bendahara umum negara sebagai *treasury* negara seperti apa sistem pengelolaannya ini? Ini kan barang *scrap* tapi masih punya nilai nilainya ini kembali kepada siapa? Apakah langsung disubstitusi kepada si pengguna atau menjadi *spending* atau nomenklatur yang lain? Tolong dijelaskan juga ke kita karena bunyi surat presiden ini kita permohonan persetujuan penjualan. Jadi jual. Pak barang milik negara berupa eks KRI Teluk Sampit 515 pada, pada lho Pak pada Kementerian Pertahanan jadi yang punya aset itu Menteri Pertahanan

Nah pertanyaannya nanti setelah ini. Ini tidak ada sampai penjelasan Wamen, penjelasan Kasal, penjelasan Wamenkeu kita nggak tahu mau di kemanakan ini Pak. Padahal Presiden meminta persetujuan untuk penjualan jadi tolong ini agar *clear* dulu sebelum kita memberi tanggapan atau persetujuan masing-masing fraksi. Saya kira demikian terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih Pak Effendi, saya kira Wamenkeu yang menjelaskan mekanisme ini bahwa persetujuan itu memang kalau harga perolehan sekian. Harga bukunya tentunya tidak segitu. Tolong jelaskan dengan jelas kepada kita dengan baik sehingga nanti yang melakukan lelang siapa kemudian barang dikemanakan itu tolong jelaskan dengan selengkap-lengkapnyanya Pak.

WAKIL MENTERI KEUANGAN (PROF. SUAHASIL NAZARA, S.E., M.SC., PH.D.):

Baik Bapak, Pak Effendi terima kasih pertanyaannya. Jadi di dalam tata kelola mengenai barang milik negara kita mengenal ada konsep pengelola barang. Pengelola barang itu kami Kementerian Keuangan. Yang mengelola itu artinya secara administrasi kami wajib menaruhnya dengan rapi jenis barangnya, mencatatnya. Termasuk dicatatkan ini masih tercatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat sebagai aset negara barang milik negara.

Nah teman-teman di Kementerian Pertahanan dan TNI AL adalah pengguna barang, yang menggunakan. Dia kapal ini adalah barang milik negara dikelola, diadministrasikan,

dicatat di dalam satu daftar barang milik negara yang komplit, yang dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan diaudit lalu digunakan penggunaannya adalah Kementerian Pertahanan TNI AL.

Nah sebagai bagian dari tata kelola kami yang namanya pengelola barang undang-undang mengatur kami bahwa apa yang sudah dicatatkan dalam daftar barang itu ya harus rapi. Nah kalau suatu barang itu lalu akan sudah bentuknya sudah memburuk, lalu kemudian seperti yang tadi dijelaskan maka undang-undang mengatakan boleh dilepaskan, boleh dihapus dari daftar barang milik negara. Nah yang dihapus itu dibuat berjenjang kalau nilai perolehannya di atas Rp100.000.000.000,- perolehannya, maka untuk menghapusnya kami harus mendapatkan izin persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau antara 10 sampai Rp100.000.000.000,- nilai perolehannya, izinnya persetujuan Bapak Presiden. Kalau di bawah Rp10.000.000.000,- bisa dilakukan oleh pengelola barang.

Nah ini yang kami maksudkan Pak Effendi dan Bapak Pimpinan, serta Ibu, Bapak sekalian memohon izin untuk boleh menghapuskan ini. Nah tapi kalau menghapuskan itu bukan hanya sekedar dihapus lalu hilang begitu saja. Karena seperti yang Bapak Pimpinan sampaikan ini masih ada nilai bukunya.

Nah nilai bukunya ini tentu harus kita betul-betul rapi dalam pengertian, tadi sudah ada indikasinya Pak Effendi yaitu yang disebut dengan nilai limit. Nilai limit itu adalah nilai estimasi saat ini berapa ini nilai barang ini pada saat dia diestimasi. Tadi nilainya adalah sekitar Rp740.000.000,-

Nah kalau kami nanti dalam praktiknya kalau nanti kami mendapatkan persetujuan pelepasan ini, maka yang akan dilakukan yang kami akan lakukan sebagai pengelola barang adalah kami akan menugaskan penilai pemerintah. Penilai pemerintah untuk kembali menilai barang yang akan dilepaskan ini berapa nilainya dan nilai tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses lelang. Jadi cara melepaskannya itu atau cara menjualnya itu adalah dengan menggunakan mekanisme lelang. Supaya lelangnya baik maka perlu ada nilai acuan. Nilai acuannya ini nanti penilai pemerintah yang membuatkan dan digunakan dalam proses lelang. Seluruh tata kelola ini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pak Rional Silaban adalah Dirjen Kekayaan Negara yang akan menindak lanjuti ini.

Pertanyaan berikutnya adalah uangnya masuk kemana. Uangnya masuk ke kas negara. Uangnya masuk ke kas negara. Uangnya masuk ke kas negara sebagai hasil penjualan lelang barang milik negara ada banyak lelang yang kami lakukan termasuk lelang untuk barang-barang UMKM itu biaya lelangnya masuk ke kas semua masuk ke kas negara.

Lalu apakah dengan demikian uang hasil lelang eks KRI ini kemudian langsung masuk ke TNI AL dia nanti masuknya lewat belanja negara seperti biasa. Jadi di dalam proses belanja negara kami setiap tahun mendapatkan estimasi berapa kebutuhan Kementerian Pertahanan dan juga TNI termasuk TNI AL. Tentu di dalam seluruh permintaan tersebut kami mengalokasikan belanja negara untuk Kementerian Pertahanan TNI AL. Jadi memang dia tidak langsung tidak langsung di-connect tetapi hasil penjualan yang melalui lelang masuk ke kas negara sebagai penerimaan dari lelang atau ini penerimaan negara bukan pajak Bapak. Lalu kemudian kebutuhan dari Kementerian Pertahanan, TNI termasuk TNI AL kita penuhi melalui belanja negara di APBN,

Mungkin demikian mekanismenya Bapak Pimpinan untuk tambahan informasi terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke ya.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Pak sebentar Pak. Pak itu ketentuan untuk lelangnya itu kita bisa tahu nggak Pak ya? Seperti contoh yang 2 unit kemarin itu sudah berlangsung belum lelangnya? Pak Silaban, biar Pak Silaban coba.

WAKIL MENTERI KEUANGAN (PROF. SUAHASIL NAZARA, S.E., M.SC., PH.D.):

Mohon izin kalau boleh Dirjen kekayaan negara Pak yang Pak ya.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Wamenkeu.

Jadi setelah persetujuan itu diberikan kemudian akan disiapkan usulan lelang Pak dari pengguna barangnya. Jadi dalam hal ini nanti kami mendapatkan usulan lelangnya dari TNI atau dalam hal ini Kementerian Pertahanan.

Nah saya sudah bicara dengan staf direktur lelang untuk yang seperti ini dari pengguna barang akan menyampaikan beberapa kriteria sehingga nanti ini akan dimasukkan di dalam portal *lelang.go.id*. Tapi yang berhak untuk ikut itu ada kriterianya. Jadi tidak sembarangan dan itu nanti kita menunggu apa namanya kriteria itu termasuk dalam usulan lelang yang dimaksud.

Nah kalau itu sudah ada maka dilakukan *aanwijzing* dan kemudian lelang akan dilakukan. Nah penilaian yang terakhir kita lakukan sebagai limit biasanya dalam lelang ada kemungkinan terjadi namanya TAP Pak tidak ada peminat. Ada kemungkinan. Sehingga nilai itu kita pegang. Nah yang namanya nilai itu kita pakai untuk 6 bulan dalam beberapa kasus baik TNI-Polri. Ada yang tidak ada TAP dan setelah 6 bulan kita nilai ulang lagi. Sehingga nanti itu akan mencerminkan apa yang terjadi di pasar. Jadi mungkin itu penjelasan dari kami.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Pak sedikit Pak Kharis sebentar. Pak ini lelang utuh atau dipotong-potong Pak ?

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Mohon izin kami belum pernah mengalami sejak jadi dirjen mengenai pelelangan kapal perang ini. Tapi berdasarkan penjelasan staf biasanya itu nanti dijual sebagai strap kelihatannya begitu Pak.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Berarti dipotong-potong sudah besi tua begitu?

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Saya teknisnya belum pernah melihat cara motongnya Pak jadi mungkin itu.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Oh gimana sih kita tanya ke yang *authorized* siapa yang hadir di sini ngapain Anda hadir kalau nggak bisa jawab? Ini kita ini satu topik saja topik kita ini dimintai persetujuan atas surat presiden persetujuan penjualan nilai di atas Rp100.000.000.000,- Sementara laporan di sini kapal ini masih bernilai Rp173.000.000.000,- nah pertanyaannya langkah selanjutnya kan dijual. Dijual ke pihak siapa dan nilainya bagaimana? Mekanismenya apa, apakah dipotong-potong apakah utuh? Kita juga ingin tahu Pak jangan karena kebiasaan setelah keluar dari Senayan semuanya itu urusan di eksekutif ya seperti contoh seperti saya sampaikan tadi. Yang disita oleh KPK saja sampai sekarang kita nggak tahu itu Pak Bapak boleh lihat gudangnya di Jawa Tengah sana, nggak ada yang ngurus itu Pak.

Nah ini jangan sampai kita memberi persetujuan Menteri Keuangan nggak peduli di sini juga nggak tahu apa-apa. Jadi akhirnya hanya secara formalitas saja kita semuanya. Kita fisik saja belum pernah lihat Komisi I coba Kasal.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Kasal silakan Pak Kasal.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Aku dulu Pak Kasal nanti Bapak terima kasih Pak Yudho. Jadi Rp173.000.000.000,-itu adalah nilai perolehan. Nah saat ini *residual value* hanya sekitar Rp740.000.000.000,- Nah adapun mengenai pelelangan pemenang lelang nanti ya dia yang memotong-motong Pak. Pada dasarnya yang kita lakukan adalah memilih pemenang lelangnya berdasarkan suatu sistem yang terbuka dan *fair*. Jadi itu yang dilakukan oleh kami Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kami memastikan bahwa pelelangan itu berlangsung dengan *fair*.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Dirjen tadi kan ditanya ini lelangnya di potong atau lelang utuh Bapak kan tinggal jawab lelang utuh bahwa setelah itu mau dipotong urusan pemenang lelang. Begitulah jangan di jawab saya juga belum tahu itu.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Oh ya baik terima kasih Pak itu lelang utuh terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Lelang ya lelang utuh bahwa setelah itu mau dipotong-potong urusan pemenang lelang jawab gitu sajalah. Ini masalah akuntansi dasar. Ya silakan Pak Kasal.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT (LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak saya kira tadi sudah dijawab Pimpinan Pak jadi lelangnya ini ya lelang utuh Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kalau Bapak jawabnya nggak jelas makin dikejar, oke ya sudah jelas ya.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT (LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M.):

Jadi lelangnya ini memang lelang utuh. Jadi nanti setelah lelang dapat yang mendapatkan harga tadi terserah mereka mau dipotong atau ditarik untuk mungkin untuk restoran dan sebagainya terserah.

Nah dulu ada pengalaman waktu kapal di lelang dibawa ke Jakarta sampai di utara Semarang tenggelam karena bawahnya tidak di cek tadi Pak. Ya rugi yang membeli Pak karena sudah tenggelam di jalan, ya terserah tadi betul yang disampaikan Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke ya.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Pak sebentar Pak sebentar Pak, Pak ini limit harganya Rp700.000.000,- Pak ya?

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Saat ini 740 tapi setelah persetujuan ini dan sebelum lelang dilakukan akan dilakukan penilaian ulang lagi untuk memastikan bahwa nilai yang terakhir adalah nilai yang mewujudkan *market* terakhir.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Pak ini kita ingin tahu ini *appraisal*-nya dari pihak Kementerian Keuangan atau dari mana kok bisa nilai buku 173 nilai lelangnya Rp700.000.000,-? Kenapa nggak kita bakar saja Pak. Capek bener kita lelang itu, tenggelamkan saja kayak Bu Susi itu? Sudah Wamen aja tenggelamin lebih murah.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Jadi estimasinya dilakukan dulu oleh pengguna barang, Pak karena mereka mengetahui *residual value* tapi ketika nanti akan dilakukan pelelangan akan dilakukan penilaian ulang. Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke ya jelas ya.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin Pimpinan.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Nilai bukunya Rp173.000.000.000,- lho Pak. Kita di sini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Nilai perolehan Pak itu nilai perolehan, beda sama nilai buku nilai buku itu nilai tercatat sekarang Pak.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Nilai perolehan nilai buku itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Harga perolehan pada saat beli.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Iya, saya tanya nilai buku sekarang berapa? itu 740 bukan dong itukan nilai jual dia mau lelang.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Yang dihapuskan berapa Pak 740 kan? Makanya Bapak jawab yang jelas dong.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin Pimpinan izin. Jadi menarik soalnya saya pikir tadi *appraisal* pertama itu dari Kemenkeu. Jadi ketika mau dijual Kemenkeu *appraise* lalu nanti mau dijual mau fiks ini nilai acuan Kemenkeu *appraise* ulang. Tapi ini *confirm appraise* pertama itu datangnya dari pengguna ya TNI Angkatan Laut ya memang selalu begitu Pak setiap kali penjualan barang milik negara selalu pengguna yang meng-*appraise* pertama. Terus *chances* harga acuan tadi berbeda lebih tinggi daripada harga yang di ajukan oleh pengguna bagaimana selama ini?

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Yang kita pakai adalah yang nilai terakhir Ibu.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Nggak soalnya begini Pak inikan kita Pak yang kami punya kewenangan itu di atas Rp100.000.000.000,- betul Pak ya? Tidak disebut, Bapak mau interupsi silakan Pak.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Jadi kalau nilai perolehannya di atas Rp100.000.000.000,- memerlukan persetujuan DPR Bapak.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Nah makanya sementara sekarang ini sudah bicara 700.000.000,- kok sesulit ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Effendi yang ini saya jelaskan ya, nggak soalnya harga perolehan beda nilai perolehannya itu nilai waktu itu. Jika nilai perolehan di atas Rp100.000.000.000,- butuh persetujuan DPR.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Ngerti Pak itu ngerti. Saya hanya mengatakan ini surat presiden ya disebut sini tidak ada disebut nilai penjualan berdasarkan nilai di luar buku, di luar perolehan nggak ada Pak. Bapak baca ini suratnya nggak ada. Kita tahu ini 173 ini uang, nggak ada. Itu kata siapa Rp700.000.000,- ini nggak ada ini surat Presiden ini Pak Joko Widodo ini

Coba baca Pak Dirjen di mana ditulis di sini? Jadi makanya kita melihat kok serumit ini nanti bulan depan datang lagi Panglima nemenin lagi begini karena 15 unit ini Pak baru di laut belum di darat panser-panser Bapak segala Leopard panser Scorpion mau di-scrap semua lama-lama kita urusannya urusan besi tua ini Pak. Kenapa nggak sekaligus datang itu lho Pak Panglima?

Ya Pak Wamen ya kalau memang waktunya kita *schedule-in*, ayo di sini juga ada pokjanya dibikin Panjangnya begitu lho Pak ini surat Presiden begini Pak. Nah bagaimana Pak Rio Silaban?

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (RIONALD SILABAN):

Bapak Pimpinan izin. Jadi memang surat Bapak Presiden menyampaikan Rp173.000.000.000,- karena itu adalah nilai perolehannya Pak. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang yang nilai perolehan di atas Rp100.000.000.000,- kami memerlukan persetujuan DPR, itu penjelasannya Bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke ya. Harga jualnya itu urusan pengelola kekayaan negara nanti jadi terpisah. Sebagaimana tadi misalnya ini harus diganti dong diganti ya mekanisme penganggaran gitu mekanisme keuangannya seperti itu. Sama penjualannya, barangnya itu yang melelang pengelolaan kekayaan negara saya kira.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin Pimpinan terakhir untuk nanti katanya tadi ada 15 *sounding* ya jadi mungkin bisa di sekaligus saja Pak. Jadi kita juga nggak buang waktu berkali-kali kan lebih baiknya seperti itu.

Ya untuk di laut atau di Angkatan Darat jadi langsung pula jangan kemarin 2, besok 1, besok 1 kita kan buang waktu juga. Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya saya kira harapan kita juga sama-sama jadi satu tapi surat presiden kemarin 2 sekarang 1 kan kita nanggapi surat presiden ini. Diajukannya sudah bareng-bareng begitu jadi saya kira begitu.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT (LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M.):

Memang ada kendala juga tadi yang tadi yang disampaikan Pak Dave tadi, yang lain kita ajukan pada saat kita ajukan ternyata ada permintaan oleh pemerintah daerah tadi. Nah begitu nggak jadi kami harus ajukan ulang lagi sehingga tidak sama-sama yang 15 tadi Bu. Ada juga yang tidak kita ajukan karena untuk sasaran penembakan seperti itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke ya, jelas saya kira. Oke kita putar mulai dari Fraksi PDI Perjuangan silakan pendapatnya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Terima kasih Pimpinan setelah kami mendengar penjelasan dari Wamenhan kemudian juga dari Wakil Menteri Keuangan beserta jajarannya, kemudian dipahaminya penjelasan-penjelasan tadi oleh rekan-rekan, kemudian juga kami melihat risalah proses penghapusan mulai dari Mabes Angkatan Laut lanjut ke Mabes TNI lanjut ke Kemenhan lanjut ke Kementerian Keuangan dan ke Presiden dan kemudian menunggu keputusan DPR RI maka Fraksi PDIP Perjuangan pada prinsipnya sepakat. Tentu dengan catatan mohon mendapatkan perhatian apa yang tadi dikritisi itu agar uang itu kembali ke negara dan dimanfaatkan untuk keperluan mudah-mudahan keperluan pertahanan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Berdasarkan hasil paparan yang disampaikan oleh Bapak Wamenhan dan juga Bapak Wamenkeu dan juga catatan-catatan yang disampaikan oleh Bapak Kasal dan Bapak Panglima secara prinsip kami dari Fraksi Partai Golkar bisa menerima bahwa persetujuan pemindahtanganan dari KRI TSP 515 ini. Akan tetapi dengan dinamika yang tadi mungkin

perlu ada sedikit catatan untuk ke depan, kiranya kita bisa mendapatkan rencana pelepasan BMN ini sekaligus juga penggantinya atau formasi yang untuk menggantikan kapal-kapal yang akan atau aset-aset yang akan dilepas ini. Sehingga kita ada gambaran utuh mengenai berapa yang akan dilepas dan berapa yang akan dimiliki baru. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih Pak Bobby dari Fraksi Partai Golkar selanjutnya dari Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Terima kasih Pimpinan yang kami hormati.

Wakil Menteri Pertahanan Wakil Menteri Keuangan beserta Pak Dirjen Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut yang saya hormati Beserta rekan-rekan Anggota Komisi I.

Pertama pada prinsipnya kami menyetujui dari berbagai macam kajian dan data tersebut ya sesuai dengan paparan dan hemat kami kebijakan penjualan barang milik negara ini berupa kapal eks KRI 515 pada Kementerian Pertahanan adalah langkah yang sangat tepat dalam rangka modernisasi alutsista kita.

Kemudian yang kedua, untuk usulan penghapusan ini juga atau kapal tersebut dikarenakan sudah tidak layak pakai selain itu didasarkan juga pada alasan dapat mengganggu fungsi dermaga yang mengutamakan kapal yang siap operasional.

Kemudian melihat dari proses dan alur pengajuan, penghapusan kapal tersebut saya pikir sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan tetapi juga dari Presiden. Namun yang menjadi catatan kami sebelum masuk pada persetujuan yaitu nilai dari pada aset tersebut dalam rangka pelelangan itu perlu dihitung kembali oleh Kementerian Keuangan agar jangan sampai nilai jual atau nilai lelang itu tidak sesuai dengan aset yang akan kita lelangkan.

Mengapa demikian? Karena saya pikir ini masih ada lagi di susul beberapa KRI maupun aset-aset di Kementerian Pertahanan dan juga di TNI yang akan kita lelang ke depan. Jadi ini saya pikir perlu menjadi catatan sehingga jangan sampai kita jual tanpa melalui proses perhitungan yang tepat untuk menjual barang atau aset milik negara.

Nah ini yang tadi juga disoroti oleh Pak Effendi sehingga pada prinsipnya kami dari Fraksi Gerindra dengan catatan tersebut dapat menyetujui untuk penjualan KRI 515, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih dari Fraksi Partai Gerindra selanjutnya dari Fraksi Partai Nasdem silakan. Belum ada ya dari Fraksi PKB silakan.

F-PKB (A. HELMY FAISHAL ZAINI):

Baik.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Izin saya Helmy Faizal Zaini dari Fraksi PKB menyampaikan pandangan fraksi pertama bahwa prinsip dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan negara adalah mempertimbangkan seluruh yang menjadi spirit kita untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan yang kedua tentu mempertimbangkan aspek-aspek yang saya kira ini lebih kepada efektivitas dan kemanfaatan dari nilai barang itu sendiri maka untuk itu Fraksi PKB dengan ini terkait dengan penghapusan ataupun penjualan pengelolaan BMN eks KRI Teluk Sampit 515 dengan ini kami menyetujui dan sekaligus dengan catatan bahwa seluruh pendapat dari fraksi-fraksi dalam upaya untuk menyempurnakan sekaligus mematangkan dari perusahaan pada siang hari ini agar sekiranya diperhatikan dan dipertimbangkan terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih dari Fraksi PKB selanjutnya dari Fraksi sebentar Nasdem ada yang *online* nggak? Nggak ada. Baik selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat silakan.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Terima kasih Pak Ketua.

Pertanyaan Prof. Sjarif Hassan mudah-mudahan sudah terjawab pada Pak ya. Tapi pada prinsipnya Pak Ketua setelah mendengar paparan tadi secara komprehensif sudah disampaikan baik dari Pak Wamenhan baik dari Kementerian Keuangan begitu juga Panglima dan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, kami pada prinsipnya dapat menerima Pak usulan ataupun kebijakan penjualan BMN berupa kapal eks KRI Teluk Sampit 515 pada Kementerian Pertahanan itu. Tentu dengan catatan bahwa kami di sini sebagai Komisi yang membidangi pertahanan berharap terutama di sini pada momen strategis ini ada Pak Wamenkeu untuk bisa diberikan keberpihakan lebih Pak secara anggaran kepada bidang pertahanan di negara kita. Karena tadi secara gamblang saya ingin menyampaikan yang Bapak omongin tadi panjang lebar itu barangnya seperti ini. Kasihan negara kita Pak pundi-pundi kekayaan kita yang jaga banyak barang-barang yang tidak layak seperti ini.

Jadi kesempatan ini kami ingin menyampaikan mohon kiranya bahwa kami mengetahui kondisi fiskal saat ini sangat sulit apalagi di masa Pandemi Covid-19 tapi selalu kami sampaikan dari Fraksi Partai Demokrat bahwa jangan sampai ada kompromi terkait dengan penjagaan kedaulatan di wilayah kita Pak. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih kemudian dari Fraksi PKS. Saya sendiri menanggapi permintaan persetujuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan setelah mendengarkan penjelasan dari Wamenkeu, Wamenhan, Panglima TNI dan Kasal juga pendapat diskusi dari teman-teman Fraksi PKS menyetujui penjualan BMN kapal eks KRI Teluk Sampit TSP 515 untuk dilanjutkan sesuai dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Terima kasih. Selanjutnya dari Fraksi PAN.

F-PAN (IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.SC.):

Terima kasih Pimpinan.

**Rekan-rekan Komisi I dari Pemerintah.
Dari Wakil Menteri Pertahanan.
Wamenkeu dan jajaran.
Beserta Panglima TNI dan jajaran.**

Saya kira persoalan persetujuan hampir semua fraksi nggak ada persoalan masalah persetujuan. Cuma memang catatan itu yang memang perlu menjadi pertimbangan kita semua. Jadi kita semua di Komisi I ini semua gelisah pada persoalan kekuatan pertahanan kita. Jadi saya kira mudah-mudahan apa yang menjadi catatan-catatan tadi itu khususnya di dalam Angkatan Laut yang begitu luas yang saya kira memang pergantian-pergantian itu jangan juga dikaitkan kepada persoalan semata kekuatan fiskal. Karena kadang-kadang juga ya sederhananya kita kalau mau ganti mobil gitu kan kira-kira jual yang lama beli yang baru kira-kira seperti itu. Itu kan hal-hal simpel saja kalau memang kekuatannya tidak ada minimal dari 15 yang direncanakan berapa kekuatannya jangan mengurangi anggarannya angkatan pertahanan juga ini tambahannya gitu.

Jadi kalau plafonnya yang dianggarkan untuk Kementerian Pertahanan dan seluruh jajaran di bawahnya itu sekian triliun itu lalu kemudian dengan hasil penjualan ya harusnya menjadi penambah bukan kemudian itu menjadi kas negara saja. Saya kira ini konsennya komisi lebih pada itu dibandingkan persoalan persetujuan saya yakin kalau pemerintah sudah melakukan keputusan ingin menjual presiden telah mengirimkan surat secara akuntabilitas saya kira itu sudah sangat masuk akal. Tapi ini yang menjadi kegelisahan kami semua di Komisi I khususnya berkaitan dengan kekuatan pertahanan kita.

Saya kira itu terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih Pak Rizki. Selanjutnya terakhir dari Fraksi PPP belum ada? Baik, dari PPP tidak ada yang hadir juga dari NasDem juga tidak ada yang hadir. Tujuh dari sembilan Fraksi menyetujui usulan untuk penjualan persetujuan penjualan barang milik negara Kapal eks KRI Teluk Sampit TSP 515., saya kira kita langsung ke kesimpulan rapat.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Pak Ketua. Saya mohon semua yang di dimintakan persetujuan ke DPR Pak Menteri Keuangan untuk dilaporkan. Karena tadi ada TAP istilahnya itu, tidak ada peminat hebat banget itu Indonesia istilahnya. Jadi kalau TAP itu bahasa apa sih itu, TAP tidak ada peminat. Ini negeri harus dibenahi mana istilah tidak ada peminat, orang puing saja ada peminat kok. Ini kacau-kacauan istilahnya TAP tidak ada peminat nanti di laporan kami tinggal 15.000,- pengganti uang materai. Lho bisa jadi karena kita setelah memberi persetujuan tidak lagi balik ke kita itu angka. Tahu-tahu sudah di BPK sana lagi 3 tahun lagi itu baru ada, siapa lagi yang mau ngecek-ngecek itu? Padahal kesejarahannya Pak Yudho jangan-jangan berapa tahun di situ ini kita kadang-kadang materilnya kita nggak hargai Pak. Begitu *scrap* nilainya berapa oh TAP Pak. Diulang lagi TAP lagi.

Yang terakhirnya Pak marah-marah orangnya Pak. Nah ini saya mohon semua yang diminta kan persetujuan ke DPR wajib dilaporkan. Karena kita ingin masuk juga Pak dan kapan pelaksanaan lelangnya, saya mau hadir juga Pak, saya mau hadir. Jangan Dirjen bilang saya tidak tahu tadi. Masa Dirjen tidak tahu mau yang besar-besar saja yang *you* tahu yang kecil-kecil *you* tidak tahu ya. Saya mau hadir nanti karena ini aset yang bersejarah ini dari tahun '79

ribuan tentara turun dari LST itu. Jadi kesejarahan ini juga punya nilai saya daftar Ketua untuk hadir di pelelangannya. Saya bukan daftar sebagai ikut peserta, pembeli bukan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Mau melihat saja ya mau melihat

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Peserta Pak? Oh nggak boleh, nggak, nggak. Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kesimpulan rapat kerja DPR RI dengan Wamenhan, Wamenkeu, Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kamis 24 Maret 2022.

Setelah mendengarkan penjelasan Wakil Menteri Pertahanan Wakil Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut dan pendapat Fraksi-fraksi Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan Kapal eks KRI Teluk Sampit 515 pada Kementerian Pertahanan sesuai dengan Surat Presiden RI Nomor R-57/Pres/12/2021 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kapal Eks KRI teluk teluk Sampit 515 pada Kementerian Pertahanan dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya kira demikian ya, baik persetujuan kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak, Ibu sekalian sebelum rapat saya tutup saya persilakan Wamenhan untuk menyampaikan *closing statement*nya, silakan.

WAKIL MENTERI PERTAHANAN (LETNAN JENDERAL TNI MUHAMMAD HERINDRA, M.A., M.SC.):

Terima kasih Pimpinan rapat kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih atas persetujuan penjualan barang milik negara berupa KRI teluk Sampit 515 dan kami akan segera menindak lanjuti sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik terima kasih kami ucapkan kepada Wamenhan dan Wamenkeu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Laut dan seluruh jajarannya Pimpinan dan Anggota Komisi I yang telah mengikuti rapat ini dengan seksama dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilamin* rapat ini saya akan ditutup.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.20 WIB)
(KETUK PALU: 3X)**

Jakarta, 24 Maret 2022
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001